



Warga Keluhkan Tingginya PBB Rumah Heritage di Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah warga menyambangi agenda open house rutin yang digelar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogya, Hasto Wardoyo-Wawan Hama-wan, Rabu (19/3) pagi. Dalam kesempatan itu, warga sempat mengeluhkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu warga yang menyampaikan keluhan kesahnya adalah Sani Putri (73). Warga Tegalrejo ini secara antusias tiba di Kompleks Balai Kota Yogya sejak pukul 05.00 WIB. Kesempatan *open house* pun dimanfaatkan untuk mengeluhkan kenaikan PBB rumahnya yang berstatus *heritage* dalam beberapa tahun terakhir.

Perempuan yang berprofesi sebagai perajin batik itu berharap kebijakan yang lebih berpihak kepada pemilik rumah *heritage*, agar tidak semakin terbebani pajak tinggi. "Awalnya naik Rp2 juta saat pandemi, lalu jadi Rp3 juta. Dua tahun berikutnya, naik lagi menjadi Rp5 juta dan sekarang sudah Rp7 juta. Padahal, rumah saya itu *heritage*, sudah berusia 117 tahun dan sudah dapat SK Gubernur," katanya.

Menurutnya, melesatnya ketetapan pajak semakin membebani pemilik rumah *heritage*, lantaran biaya perawatannya



DOK. PEMKOT YOGYA

SUARAKAN ASPIRASI - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogya berfoto bersama warga yang menyambangi agenda open house, di Balai Kota Yogya, Rabu (19/3) pagi.

sangat menguras kantong antara Rp20-25 juta per bulan. Meski demikian, Putri memahami, proses untuk mengubah nilai pajak tidak semudah membalikkan telapak tangan, serta butuh waktu lama.

"Tapi, sebagai warga, saya tetap berupaya menyuarakan aspirasi, termasuk dengan berani melakukan audiensi. Saya selalu menghargai setiap kesempatan untuk berdiskusi dan berharap ada solusi konkret," tandasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan, bahwa revisi pajak baru dapat dilakukan beberapa tahun

ke depan. Pihaknya pun bakal mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi rumah Sani Putri, guna melihat kondisi sebenarnya.

"Kalau soal revisi pajak, memang ada proses yang harus ditempuh dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tapi, saya ingin mencari cara lain agar ibu bisa tetap mendapat penghasilan untuk membayar pajak," terangnya.

"Salah satunya dengan memproduksi batik secara massal dan menjualnya kepada pelajar di Kota Yogya, daripada mereka membeli batik printing dari daerah lain," urai Hasto. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Wakil Walikota			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005